

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan dan pengaruh lingkungan yang terjadi dewasa ini akibat tuntutan zaman, menyebabkan dampak yang signifikan terhadap peradaban manusia. Fakta dan fenomena yang ditunjukkan sebagai dampak global sesungguhnya telah lama terjadi dalam dekade sebelumnya dan akan terus berlangsung ke depannya. Dampak yang signifikan terhadap semua aktivitas organisasi, sebagai dampak dari perubahan dan perkembangan teknologi informasi, telah memberikan peran dalam proses manajemen dan aspek lain, seperti makin intens dan tajam tuntutan masyarakat (*society claims*) terhadap berbagai kebijakan pemerintah, perubahan terhadap permintaan kebutuhan masyarakat (*customer society demands*) dengan tingkat persaingan yang tinggi dan kompleks.

Perubahan pada berbagai sektor sering tidak dapat diprediksi dan dihadapkan pada adanya unsur ketidakpastian (*uncertainly*) terkait pada nilai-nilai organisasi (perusahaan), sebagai contoh seperti terjadinya perubahan pada sektor perekonomian global, sarat dengan ketidakpastian dan sulit diprediksi, bahkan upaya restrukturisasi dalam banyak hal sering tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dan mengubah budaya perusahaan. Oleh sebab itu paradigma manajerial yang dikembangkan dalam organisasi mampu beradaptasi dengan tantangan yang timbul dari fluktuasi perubahan lingkungan bisnis yang dihadapi. Seperti yang pernah

diungkapkan dalam tiga dekade sebelumnya (**Grant, 2012**), bahkan saat ini dirasakan dan akan terus berlangsung, yaitu: “...dalam lingkungan yang tidak pasti, suatu organisasi harus bisa beradaptasi. Ketika sebuah organisasi tidak bisa menjaga stabilitasnya karena ketidakpastian dimasa yang akan datang, hal tersebut menegaskan bahwa responsibilitas untuk melakukan adaptasi menjadi sangat penting. Meskipun sisi lain dari perubahan tersebut harus diketahui”

Robbins (2015) menyatakan bahwa dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis dan terus berubah, maka organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, jika tidak maka bersiaplah organisasi tersebut untuk binasa. Hal ini adalah konsekuensi hidup saat ini yang termasuk pada zaman ketidaksinambungan, persaingan antar organisasi selalu berubah. Ekonomi global memunculkan banyak pesaing yang datang dari berbagai tempat. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat berubah untuk menghadapi persaingan, mereka akan tangkas, mampu secara cepat mengembangkan inovasi-inovasi baru dan siap menghadapi persaingan baru. Akan tetapi perubahan dilakukan melalui berbagai pemikiran terlebih dahulu.

Robbins (2015) memberikan contoh bagaimana sektor-sektor perumahan dan finansial telah mengalami guncangan ekonomi yang luar biasa, mengarah pada penghapusan, kebangkrutan atau akuisisi dari beberapa perusahaan yang terkenal di AS, meliputi Bear Stearns, Merryll Lynch, Lehman Brothers, Countrywide Financial, Washington Mutual dan

Ameriquest. Setelah beberapa tahun mengalami penurunan kinerja, banyak perusahaan di AS mengalami kebangkrutan, yang mengarah kepada resesi global, antara lain pabrikan mobil General Motors dan Chrysler, para retailer Borders and Sharper Image.

Intinya adalah setiap organisasi tidak imun dan terlepas dari pengaruh lingkungan, sehingga dibutuhkan kemampuan dalam beradaptasi. Demikian halnya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dalam penelitian ini konsep teori manajemen tersebut di atas juga akan diterapkan dalam melakukan identifikasi permasalahan dan efisiensi organisasi, terlebih lagi bahwa pengembangan UMKM merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

Keberadaan pelaku UMKM yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan terdistribusi di seluruh sektor ekonomi, menjadikan peran UMKM semakin strategis, terutama dalam upaya pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perubahan struktur pelaku usaha nasional, yang berpengaruh pada kuatnya perekonomian Indonesia (**Jauhari, 2009**). Salah satu faktor penting bagi pelaku usaha, termasuk bagi UMKM untuk mampu berkiprah dengan baik di tengah kompetisi usaha yang semakin ketat adalah perlunya penciptaan lingkungan yang kondusif, yang memberi peluang dan kemudahan bagi UMKM untuk melakukan aktivitas bisnis, menangkap berbagai kesempatan usaha dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia, dilihat dari jumlahnya, tenaga kerja yang terlibat, sumbangannya terhadap PDB dan nilai ekspor nasional, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data UMKM RI

No.	Indikator	Satuan	2011	2012	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	55.206.444,00	56.534.592,00	57.895.721,00
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,57	2,41	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	101.722.458,00	107.657.509,00	114.144.082,00
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	2,33	5,83	6,03
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1.369.326,00	1.451.460,20	1.536.918,80
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	6,76	6,00	5,89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	187.441,82	166.626,50	182.112,70
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	6,56	(11,10)	9,29

Sumber Data: Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Perkembangan UMKM, selalu berkorelasi signifikan dengan perkembangan ekonomi sebuah negara (Hapsari, 2014). Pasca terjadinya krisis ekonomi global tahun 1998, sektor UMKM menjadi pilihan ekonomi utama masyarakat (BI, 2015). Kondisi tersebut terus berlangsung sampai dengan tahun 2013, jumlah UMKM terus meningkat dan pada tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit.

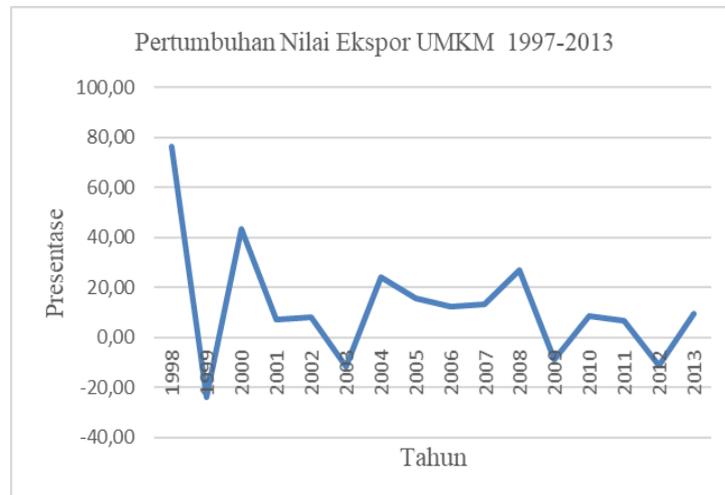
Pada tahun 2013, jumlah pelaku UMKM tercatat sebesar 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM dalam pembentukan total PDB nasional (atas dasar harga konstan) tercatat sebesar Rp. 1.536 triliun atau 57,56% dari total PDB nasional, penyerapan tenaga kerja sebanyak 114,14 juta orang atau 96,99% dari total tenaga kerja yang bekerja, serta kontribusi UMKM terhadap pembentukan total ekspor sebesar Rp.182 triliun atau 15,68% dari total ekspor nasional (Kementerian Koperasi dan

UMKM, 2014). Terhitung hampir 90% dari total usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari UMKM (**Lin,1998**). Selain itu, dapat dikatakan bahwa UMKM memiliki peranan terhadap penyerapan tenaga kerja (**Tambunan, 2005**).

Kendati jumlah unit UMKM tampak begitu banyak dan hampir mencapai 100% dari seluruh pelaku wirausaha, namun rasio jumlah pelaku wirausaha (*entrepreneur*) –skala mikro, kecil, menengah dan besar– dibanding jumlah penduduk di Indonesia masih tergolong kecil, dengan skala acuan World Bank sebesar minimal 5% dari jumlah penduduk. Tahun 2016, dengan jumlah penduduk sebanyak 252 juta orang, jumlah wirausaha non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta orang atau 3,1% (**BPS, 2016**). Tingkat kewirausahaan Indonesia memang telah melampaui 2% dari populasi penduduk, sebagai syarat minimal suatu masyarakat akan sejahtera. Kendati begitu, rasio sebesar 3,1% tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia 5%, China 10%, Singapura 7%, Jepang 11% dan AS 12% (Koran Sindo, 19 Juni 2017).

Selain permasalahan rasio jumlah pelaku usaha yang masih kecil, permasalahan lain yang menjadi perhatian di sini adalah performa UMKM dalam menyumbangkan nilai ekspor nasional juga masih cukup rendah dan belum mampu menggeser produk sejenis yang dihasilkan oleh UMKM dari negara lain, seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1.1
Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM 1997-2013



Sumber Data: BPS, 2014

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan nilai ekspor UMKM bergerak fluktuatif, terlihat kontradiktif dibandingkan dengan peningkatan jumlah unit UMKM yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peran UMKM dalam mendorong pendapatan devisa melalui ekspor dirasa masih kurang, pada tahun 2012 menyumbang sekitar 14,06% dan pada tahun 2013 menyumbang 15,68% dari total nilai ekspor non migas nasional (**Kementerian Koperasi dan UKM, 2013**). Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa dengan jumlah unit usaha yang sedemikian besar, UMKM masih belum kapabel menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan devisa non migas nasional.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, sebagai pelaku ekonomi, peranan UMKM terhadap ekonomi nasional perlu ditingkatkan, dengan memberikan dukungan permodalan serta iklim usaha yang kondusif, sehingga kinerja dan daya saing UMKM dapat meningkat, berkembang dan

naik kelas, serta merangsang terciptanya wirausaha-wirausaha baru.

Dalam perkembangannya, UMKM masih menghadapi kendala struktural-kondisional **secara internal**, seperti struktur permodalan sendiri (*self financing*) yang relatif lemah dan juga dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan yang seringkali terbentur masalah kendala agunan (*collateral*) sebagai salah satu syarat perolehan kredit (**Hanan, 2003**). Kendati UMKM, yang sesungguhnya andal terhadap krisis, namun mereka tetap saja sulit untuk mendapat fasilitas kredit karena terbentur pada aturan-aturan perkreditan yang kompleks dan menciptakan situasi yang dilematis baik bagi calon debitur maupun bagi bank pemberi kredit (**Kamio, 2003**). UMKM selalu kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank (**Niode, 2010**). Sistem perbankan dengan persyaratan-persyaratan teknis yang diberlakukan bagi calon peminjam, sulit untuk dapat berkesesuaian dengan kondisi sebagian besar UMKM.

Faktor internal lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), terkait dengan keterampilan teknis yang masih rendah, dengan teknologi produksi yang masih sederhana. Rendahnya keterampilan teknis UMKM berakibat pada sulitnya standarisasi produk. Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi. Kalau hal ini terjadi, maka produk yang dikirim kemungkinan akan di-*reject* oleh konsumen, yang tentunya akan merugikan, apalagi jika produk ditolak oleh konsumen di luar negeri. Dari sisi SDM, faktor internal yang cukup berpengaruh adalah para pekerja umumnya

keluarga, artinya dalam perekrutan pekerja lebih ditekankan pada aspek kekeluargaan, yaitu lebih mementingkan kedekatan hubungan dibandingkan dengan keahlian yang dimiliki, hal ini menyebabkan dalam manajemen tidak ada spesialisasi bahkan seringkali pemilik menangani sendiri, artinya dalam menjalankan perusahaan tidak terdapat *job description* yang jelas. Disamping itu tingkat perputaran tenaga kerja tinggi, hal ini akan mengakibatkan sulitnya menjadikan tenaga kerja yang betul-betul ahli **(Kuswanto, 2015)**.

Rapih (2015) menyatakan kualitas SDM mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja UMKM. Kemajuan UMKM di negara maju tidak lepas dari kualitas SDM yang baik. Tak dapat dipungkiri, pengembangan sektor SDM di Indonesia mutlak diperlukan, karena unsur inilah yang merupakan kunci untuk memajukan sektor UMKM di Indonesia. Dengan memiliki kualitas SDM yang cukup memadai, maka para pelaku usaha akan bisa terus berkembang, lebih kreatif dan berinovasi, sehingga dunia usaha sektor UMKM akan semakin berkembang dan berkualitas.

Dalam kaitannya antara Kualitas SDM dan Akses Permodalan, lemahnya dalam administrasi keuangan, kondisi ini seringkali menjadi penyebab sulitnya UMKM mengajukan kredit ke pihak ketiga, sebab para investor baru mau menanamkan uangnya kalau terjamin keamanannya, artinya uang yang ditanamkannya dijamin akan kembali dan sekaligus memperoleh keuntungan. Lemahnya administrasi keuangan mengakibatkan sulitnya melakukan penilaian kelayakan. Terkait dengan lemahnya

administrasi keuangan seringkali dijumpai tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi (**Harmanto, 2007**).

Selain faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi performa UMKM secara umum adalah sulitnya akses informasi terkait dengan permodalan dan pemasaran, yang membuat UMKM tidak mengetahui prosedur dan persyaratan dalam memperoleh kredit, pangsa pasar, celah, serta jalur distribusi yang tepat untuk memastikan keberlangsungan usahanya. Sehubungan dengan pengaruh akses informasi terhadap akses permodalan, seiring berkembangnya teknologi informasi, fintech atau teknologi finansial (Tekfin) berkembang pesat di seluruh dunia. Tekfin muncul dalam berbagai bentuk dan skema, termasuk Tekfin syariah yang mulai berkembang. Beberapa negara, seperti Dubai, Kanada, Singapura dan Malaysia, telah memiliki Tekfin syariah dalam berbagai bentuk, antara lain yang berfokus pada pemberian pinjaman (**BI, 2017**).

Kondisi ini merupakan salah satu bukti nyata atas fenomena pengaruh akses informasi terhadap akses permodalan. Kendati begitu, peneliti tidak akan banyak mengkaji dan menganalisis perkembangan teknologi finansial, melainkan meneliti dan menganalisis hipotesis pengaruh akses informasi terhadap akses permodalan.

Rapih (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akses informasi berpengaruh terhadap akses permodalan. Semakin baik seorang wirausahawan berjejaring dengan berbagai kalangan, maka akan semakin baik pula kemampuan dia untuk mengelola keuangan dan terlebih semakin

membuka peluang untuk mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. Banyak pengusaha UMKM yang tidak bisa mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan dikarenakan minimnya informasi.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kinerja UMKM adalah Kualitas SDM, Akses Informasi dan Akses Permodalan UMKM. Sedangkan bila dilihat dari korelasi dan pengaruh antar ketiga faktor, sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa kualitas SDM baik sistem rekrutmen dan administrasi mempengaruhi UMKM memperoleh akses untuk memperoleh pinjaman/kredit (akses permodalan) serta adanya akses informasi yang cepat dan memadai juga diduga mempengaruhi UMKM dalam memperoleh akses permodalan –misalnya, perlunya sosialisasi dari pemilik dana (investor) atau UMKM itu sendiri yang tidak memiliki akses informasi- (**Sudiarta, 2014**). Berdasarkan penjelasan ini, akses permodalan menjadi faktor kunci dan menjadi jembatan atas keberlangsungan usaha UMKM dan mempengaruhi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Identifikasi permasalahan utama yang membuat UMKM sulit dalam mengakses kredit/permodalan, akan ditindaklanjuti dengan pembentukan strategi baru yang menjamin keberlangsungan akses permodalan UMKM untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. Kondisi internal dan eksternal yang menjadi kendala utama akan menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM, yang akhirnya berpengaruh terhadap akses permodalan UMKM, dimana akses permodalan merupakan

faktor utama UMKM untuk meningkatkan skala usahanya. Dengan lemahnya akses permodalan, kinerja UMKM akan cenderung mengalami stagnasi dan penurunan ditinjau dari segi *profit*, *total assets* dan *risk taking* (Nurfariani, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut di atas, dengan menggunakan sampel mitra UMKM dari LPDB-KUMKM, di Wilayah Provinsi Jawa Barat, maka rumusan masalah penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas SDM memiliki pengaruh langsung terhadap Akses Permodalan?
2. Apakah Akses Informasi memiliki pengaruh langsung terhadap Akses Permodalan?
3. Apakah Akses Permodalan memiliki pengaruh langsung terhadap Kinerja UMKM?
4. Apakah Kualitas SDM memiliki pengaruh langsung terhadap Kinerja UMKM?
5. Apakah Akses Informasi memiliki pengaruh langsung terhadap Kinerja UMKM?
6. Apakah melalui mediasi Akses Permodalan, Kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap Kinerja UMKM?
7. Apakah melalui mediasi Akses Permodalan, Akses Informasi memiliki pengaruh terhadap Kinerja UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rangka memperoleh bukti empirik dan untuk menentukan kejelasan fenomena tentang pengaruh Kualitas SDM dan Akses Informasi terhadap Akses Permodalan UMKM dan dampaknya terhadap kinerja UMKM melalui pengujian dan analisis data secara spesifik, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian terlebih dahulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Kualitas SDM terhadap Akses Permodalan.
2. Mengetahui pengaruh Akses Informasi terhadap Akses Permodalan.
3. Mengetahui pengaruh Akses Permodalan terhadap Kinerja UMKM.
4. Mengetahui pengaruh Kualitas SDM terhadap Kinerja UMKM.
5. Mengetahui pengaruh Akses Informasi terhadap Kinerja UMKM.
6. Mengetahui pengaruh mediasi Akses Permodalan dengan Kualitas SDM terhadap Kinerja UMKM.
7. Mengetahui pengaruh mediasi Akses Permodalan dengan Akses Informasi terhadap Kinerja UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna baik secara teoritis/akademis (positif) maupun secara praktis (normatif).

1.4.1 Kegunaan Untuk Pengembangan Ilmu

Secara teoritis/akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi ilmu manajemen, khususnya yang berhubungan dengan kualitas SDM, akses informasi dan akses permodalan

serta pengaruhnya terhadap kinerja UMKM, guna melakukan evaluasi strategi manajemen UMKM terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk meningkatkan peranan UMKM terhadap ekonomi nasional.

1.4.2 Kegunaan Operasional (Praktis)

Secara praktis operasional diharapkan berguna:

1. Bagi pihak pengelola UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM sebagai landasan kebijakan pengembangan usaha.
2. Begitu pula hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah RI dalam upaya memperkuat program ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha mikro dan kecil serta kajian ilmiah yang menguji bahwa pemberdayaan UMKM, tidak semata dengan memberikan dukungan permodalan (pinjaman/pembiayaan), melainkan juga diperlukan dukungan pelatihan, jasa manajemen, dan pengembangan *capacity building* serta sosialisasi program sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh UMKM.